

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2002). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ/2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
- Faradiza, S. A. (2019). Dampak Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 107-116.
- Fuad, K., & Khusfiah, L. (2019). Revealing Awareness and Compliance of Tax (Case Study in Tax Office (KPP) Pratama Jepara). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(2), 125-137.
- Harahap, F. R. (2021). *Tinjauan Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pelaporan dan Penerimaan Perpajakan PPh Pasal 23 atas Jasa di KPP Pratama Medan Barat*.
- Kamela, H. (2020). Pengaruh Faktor-Faktor Theory Planned Of Behaviour (TPB) Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus KPP Palembang Ilir Barat. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(2), 201-209.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (n.d.). *FAQ COVID-19*. Diakses tanggal 14 November 2021, dari <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. (2017).
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2021). *Peta Sebaran COVID-19*. Diakses tanggal 14 November 2021, dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>
- Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Toba. (2021). *Peta Sebaran Covid-19*. Diakses tanggal 14 November 2021, dari <https://covid19.tobakab.go.id/>
- Trinanda, R. M. (2021). *Tinjauan Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di KPP Pratama Kayu Agung*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. (2018).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. (2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. (2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. (2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. (2008).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. (2020).

Zulfikri, M. H. (2021). *Analisis Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada KPP Pratama Pontianak Barat*.